



Kajian Srategis & Publikasi Ilmiah

No.008 Tahun 2018

DAYA SAING INDUSTRI GULA DI ERA INDUSTRI 4.0

Ahmad Erani Yustika

ISU KUNCI

- Tata kelola rantai industri gula nasional
- Meningkatkan daya saing gula nasional di era revolusi industri 4.0

RINGKASAN

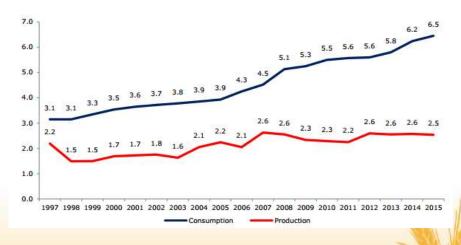
Industri makanan dan minuman memiliki kontribusi besar pada industri manufaktur di Indonesia, salah satunya adalah industri gula. Pada 2015, Produksi gula domestik saat ini hanya mencapai 2,5 ton, sementara kebutuhan mencapai 6,5 juta ton. Jadi dibutuhkan tambahan sekitar 3-4 juta ton gula impor per tahun. Namun sejak tahun 1997 sampai sekarang kita belum bisa mencukupi kebutuhan gula sehingga masih tergantung pada Impor. Akibatnya terjadi rembesan Gula Kristal Rafinasi yang harganya lebih murah ke pasar konsumsi. Padahal GKR diperuntukkan untuk bahan baku industri. Fakta ini semakin merugikan petani tebu. Rekomendasi Jangka panjang adalah perombakan sistem tata niaga gula di Indonesia, sebagai berikut: menghilangkan dualisme pasar GKP dan GKR, menciptakan iklim usaha yang sehat untuk mendorong investasi di industri gula yang efisien, menjaga kestabilan harga di pasar dengan dimilikinya informasi pasar (supply dan demand) yang akurat dan tepat waktu oleh Kementan dan Kemendag, Jangka pendek adalah perombakan sistem tata niaga gula di Indonesia, sebagai berikut: Menciptakan distribusi tertutup dengan menggunakan barcode

Pendahuluan

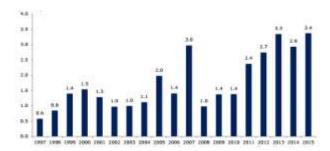
Gula menjadi salah satu input utama dalam proses produksi industri makanan dan minuman. Industri makanan minuman memiliki kontribusi besar pada industri manufaktur di Indonesia Pertumbuhan Subsektor ini selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDA. Artinya, berbagai perubahan dan kebijakan dalam industri pergulaan

memiliki dampak yang signifikan pada kinerja industri pengolahan.

Pada 2015, Produksi gula domestik saat ini hanya mencapai 2,5 ton, sementara kebutuhan mencapai 6,5 juta ton. Jadi dibutuhkan tambahan sekitar 3-4 juta ton gula impor per tahun.



Hasil dan Pembahasan



Sejak tahun 1997 sampai sekarang kita belum bisa mencukupi kebutuhan gula sehingga masih tergantung pada Impor. Pabrik gula tradisional milik Pemerintah beroperasi secara tidak efisien misalnya mesin produksi sangat tua (sebagian bahkan merupakan peninggalan pabrik gula di awal pendiriannya atau pada masa penjajahan Belanda), mendapatkan input dari petani tebu dengan biaya sewa lahan yang mahal, proses produksi panjang dan terdapat idle activity, jumlah tenaga kerja berlebih. Berkebalikan dengan kondisi pabrik gula PTP, pabrik gula modern milik sektor swasta beroperasi secara efisien. mesin produksi modern sehingga mendukung produktivitas. Mendapatkan input berupa raw sugar (pabrik gula rafinasi) atau tebu dan raw sugar (pabrik gula terintegrasi). proses produksi pendek dan tidak terdapat idle activity. Input efisien: tidak terdapat tenaga kerja yang berlebih.

Pemerintah mengatur segmentasi pasar

- a) produk pabrik gula PTP yang disebut dengan gula kristal putih (GKP) diperuntukkan bagi rumah tangga.
- b) produk pabrik gula modern swasta yaitu gula kristal rafinasi (GKR) diperuntukkan bagi sektor industri.

Segmentasi pasar ini juga disertai dengan perbedaan harga GKP dan GKR yang signifikan antara lain disebabkan oleh inefisiennya pabrik gula PTP:

- a) Rp8000 11.000/kg untuk GKR
- b) Rp10.700-Rp12.500 untuk GKP

akhirnya Hal menyebabkan ini adanya rembesan gula, yaitu GKR yang dijual di pasar ritel untuk konsumsi rumah tangga. Tujuan pemerintah membentuk dua pasar gula-GKR dan GKP—adalah untuk melindungi eksistensi petani tebu & untuk memenuhi kebutuhan Industri makanan, minuman, farmasi dan kosmetika terhadap gula yang berkualitas industri dan berstandar internasional sesuai persyaratan layak konsumsi, hal ini dikarenakan ketidakmampuan pabrik gula pemerintah untuk memproduksi gula industri. Ekses masuknya GKR di pasar gula di Indonesia dapat menjadi ancaman bagi eksistensi gula yang dihasilkan dari perkebunan tebu yang dikelola oleh petani. Ekses dari masuknya GKR di pasar gula di Indonesia dapat menjadi ancaman bagi eksistensi gula yang dihasilkan dari perkebunan tebu yang dikelola oleh petani. Dualisma pasar melindungi industri GKP yang tidak efisien dan kecenderungan praktik rentenir yang merugikan petani. Perlindungan terhadap industri yang tidak efisien mendorong ekonomi berbiaya tinggi Petani tebu tidak sepenuhnya terlindungi dari komoditas GKR karena adanya rembesan dan rembesan GKR menekan harga gula petani. Kebijakan dua pasar tidak mencapai sasaran karena pada dasarnya GKP dan GKR merupakan komoditas yang sama. Kebijakan Kemendag (2017) yang memberikan penugasan kepada pabrik gula rafinasi, untuk mengimpor

"Tujuan pemerintah membentuk dua pasar gula (GKR dan GKP)adalah untuk melindungi eksistensi petani tebu & untuk memenuhi kebutuhan industri makanan, minuman, farmasi dan kosmetika terhadap gula yang berkualitas industri dan berstandar internasional sesuai persyaratan layak konsumsi"



raw sugar, memproses dan menjual sebagai GKP juga menambah tekanan pada harga jual GKP.

- Ekonomi indonesia dimasa depan dapat ditopang oleh industri manufaktur.
- Produksi gula nasional tidak mengalami kenaikan dan cenderung stagnan
- Adanya perbedaan supply gula internasional dengan supply gula nasional. Memberikan pertanyaan dimanakah posisisi Indonesia? dalam menentukan pososi Indonesia ini, dapat diperngaruhi oleh 2 kondisi yaitu:

Kondisi pertama: bertumpu kepada produksi gula

Kondisi kedua: meningkatkan produksi gula dan produk lainnya (lahan dll)

- Permasalahan pada kebun tebu rakyat adalah permasalahan bibit unggul
- Permaslahan industri gula yaitu permasalahan kelembagaan dan permaslaahan biaya transaksi
- Permaslahan kelembagaan terdiori dari: terjadinya dualism industri gula sehingga perlu adanya peran pemerintah berupa penjagaan kualitas gula oleh pemerintah
- Permasalahan biaya transaksi dikarenakan biaya transaki pada produksi gula mencapai 40% dari baiaya keseluruhan dalam kebun rakyata dan indutri gula.
- Desain kelembagaan yang efisien, desain managemen internal yang efisien, dan pendekatan terhadap pemerintah yang efisien dapat meningkatkan daya saing industri gula di era industri 4.0

Biaya transaksi petani tebu (baik TRK maupun TRM) menyumbangkan sekitar 42% dari total biaya, dan sisanya (58%) berupa biaya produksi.

Jika variabel biaya sewa lahan dikeluarkan dari biaya produksi (karena pada umumnya petani tebu sebagian lahannya adalah menyewa), konfigurasi biaya menjadi berubah. Proporsi biaya transaksi meningkat menjadi sekitar 50% dari total biaya dan separuhnya lagi berupa biaya produksi. Jika dirinci lebih detail, 30-35% dari biaya produksi adalah sewa lahan sehingga bila ingin mengurangi biaya produksi, maka masalah kepemilikan lahan menjadi isu yang harus ditangani oleh pemerintah. Sementara untuk biaya transaksi, di samping variabelvariabel yang sudah diungkapkan di atas, masih harus ditambah dengan dugaan manipulasi rendemen, selisih bunga kredit, proses tebang angkut yang belum efisien, dan waktu giling yang belum tertangani dengan baik.

Proporsi biaya transaksi PG juga mencapai sekitar 50% dari total biaya.

Biaya transaksi terbesar disumbangkan dari model manajemen perusahaan (proses pengambilan keputusan, penataan sumberdaya manusia, dan penyusunan kontrak dengan pihak lain). Dengan begitu, biaya transaksi yang muncul di pabrik gula lebih banyak disebabkan oleh aspek managerial transaction costs. Sederhananya, biaya transaksi tersebut lebih berkenaan dengan model hubungan antara pabrik gula dengan pihak PTPN (bila dimiliki oleh pemerintah) yang cenderung sentralistis sehingga bisa mengganggu proses produksi.

| Item Produktivitas | Pabrik Tradisional PTP | Pabrik Modern Swasta |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Jumlah hari memproses/tahun | 160 hari/tahun | 320 hari/tahun |
| Produksi potensial/tahun | 2,5 – 3 MMT (dari 63 pabrik) | 3 – 4 MMT (dari 11 pabrik) |
| Jumlah tenaga kerja on | 28.350 | 0 |
| farm | | |
| Jumlah tenaga kerja off farm | 27,427 | 4.833 |
| Usia mills | paling tua adalah 184 tahun | paling tua adalah 12 tahun |
| | (sebanyak 40 dari 63 mills | |
| | berusia lebih dari 100 tahun) | |

Kesimpulan

- Gula sebagai input utama dalam industri makanan dan minuman memainkan peranan penting dalam proses industrialisasi.
- Namun demikian, industri gula masih menghadapi permasalahan dualisme yang diakibatkan perbedaan struktur produksi antara pabrik gula tradisional dan modern
- Selain itu, biaya transaksi yang muncul baik dari sisi produsen maupun petani juga menyumbang tingginya struktur biaya pada pabrik gula.
- Akibatnya terjadi rembesan Gula Kristal Rafinasi yang harganya lebih murah ke pasar konsumsi. Padahal GKR diperuntukkan untuk bahan baku industri. Fakta ini semakin merugikan petani tebu.

Implikasi dan Rekomendasi

Rekomendasi Jangka panjang perombakan sistem tata niaga gula di Indonesia, sebagai berikut: menghilangkan dualisme pasar GKP dan GKR, menciptakan iklim usaha yang sehat untuk mendorong investasi di industri gula yang efisien, menjaga kestabilan harga di pasar dengan dimilikinya informasi pasar (supply dan demand) yang akurat dan tepat oleh Kementan dan Kemendag. Memastikan harga gula petani tidak dirugikan dengan mengevaluasi dan monitoring Kebijakan pemerintah (Menko Perekonomian Kemendag) yang menyatakan bahwa hanya BULOG yang dapat membeli gula tani dengan harga Rp. 9.700, Kg serta hanya BULOG yang diperbolehkan Menjual Gula curah/ karungan ke pasar tradisional.

Jangka pendek adalah perombakan sistem tata niaga gula di Indonesia, sebagai berikut: Menciptakan distribusi tertutup dengan menggunakan barcode. Kementerian Perindustrian membuat mekanisme pemakaian GKR terpadu, mulai dari izin impor sampai dengan pemakaian GKR oleh industri (makanan, minuman, farmasi dan kosmetika), Kebijakan tentang lelang dibatalkan, karena tidak efektif dan tidak efisien, Pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) yang intensif dan terpadu (melibatkan berbagai pihak). Untuk mendukung hal ini, pemerintah juga perlu membuat estimasitentang data rembesan dan kerugian yang ditimbulkannya.

Restrukturisasi koperasi agar dapat secara efektif membantu petani untuk mendapatkan informasi, bimbingan / pengawasan, benih/pupuk murah, dan kredit dengan cepat dengan bunga rendah, sehingga mereka dapat mendukung penurunan biaya produksi dan transaksi.

Meningkatkan aksesibilitas petani tebu dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan, terutama untuk petani non-kontrak (yang tidak terikat kontrak dengan koperasi/pabrik gula), sehingga mereka tidak bergantung pada kredit dari perantara dengan bunga tinggi (lebih dari 40%). Diharapkan ini dapat menurunkan biaya transaksi yang ditanggung oleh petani tebu, terutama petani non-kontrak.

Daftar Pustaka







Email: lppm@apps.ipb.ac.id



